



KABUPATEN NATUNA

RENJA

RENCANA KERJA

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR



2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ranai, Agustus 2024

**PL. CAMAT BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA**



HARMIDI, S.A.P

NIP. 19740101 1 99803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bunguran Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.1. Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	26
3.2. Tujuan dan Sasaran	21
3.4. Kebijakan Program dan Kegiatan.....	31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja Program	32
4.2. Cascading dan Crosscutting	39

BAB V PENUTUP 42

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Kecamatan Bunguran Timur merupakan unsur penunjang Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.

b. Fungsi dan Kewenangan

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebelum Penetapan Renja setiap Perangkat

Daerah harus menyusun ranwal dan rancangan Renja. Hal ini tertuang dala Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16, pasal 126 dan pasal 131 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan sesuai dengan tahapan.

Diantara tahapan penyusunan dokumen Renja yang harus dilalui oleh Perangkat Daerah adalah : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Bunguran Timur merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bunguran Timur yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Kecamatan Bunguran Timur memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bunguran Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan. Pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Kecamatan Bunguran Timur mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Camat Bunguran Timur tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Bunguran Timur meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Kecamatan Bunguran Timur mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;

- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Kecamatan Bunguran Timur dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Kecamatan Bunguran Timur yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Kecamatan Bunguran Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Kecamatan Bunguran Timur, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Timur tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Bunguran Timur selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

RENJA Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 akan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang mengusung tema Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Unggul dan Sejahtera". Selain itu dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan isu strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022-2026 yaitu : 1) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dan aspek Kebijakan, pengawasan dan proses evaluasi, 2).Kurangnya pemahaman OPD dalam pelaksanaan delapan area perubahan, 3).Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman OPD terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8 Seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bunguran Timur ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Bunguran Timur ke dalam program kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing masing unit kerja dan atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun berkenaan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program dan kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja kelaoran keiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah 2022-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.038.738.548,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.616.348,00 atau sebesar 95,79 %.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

c. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Ranai Kota)
- 3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Bandarsyah)
- 4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Ranai Darat)
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Batu Hitam)

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan terjadinya Rasionalisasi anggaran.
3. Penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
 - a. Komitmen dan kerja sama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Bunguran Timur secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan

dalam Renstra.

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2025 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur s/d Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.2 Capaian Indikator Program Tahun Sebelumnya

Program	Indikator	Target	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJiP	79,95	65,65
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	85	85
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100	90
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	100	95
Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	80
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100

Tabel 2.1.3 Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	80
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	60
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	80
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	75
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tahun 2023 secara keseluruhan belum relatif baik dikarenakan adanya Rasionalisasi. Hal ini terlihat dari 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2023, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan fungsi lainnya tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2.1

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100														
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	15	206,054,338	20	120,000,000	20	219,180,000	20	6,648,500	20	190,715,057	20	5,245,346	20	3,444,435	20	206,054,338	100.00	94.01	100	206,054,338	100.00	171.71	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	206,054,338	100	120,000,000	100	219,180,000	100	6,648,500	100	190,715,057	100	5,245,346	100	3,444,435	100	206,054,338	100.00	94.01	100	206,054,338	100.00	171.71	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	206,054,338	1	120,000,000	1	219,180,000	1	6,648,500	1	190,715,057	1	5,245,346	1	3,444,435	1	206,054,338	100.00	94.01	2	206,054,338	100.00	171.71	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	79.95	50,082,000	80	37,661,072	79.95	55,000,000	79.95	24,581,000	20	2,490,098	71.2	3,970,147	71.2	2,460,147	71.2	4,159,680	71	13,080,072	89.00	53.21	71.2	37,661,072	89.00	75.20	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,082,000	75	37,661,072	70	55,000,000	70	24,581,000	30	2,490,098	45	3,970,147	65	2,460,147	70	4,159,680	65	13,080,072	86.67	53.21	65	37,661,072	86.67	75.20	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	3	37,661,072	2	20,000,000	2	24,581,000	2	2,490,098	2	3,970,147	2	2,460,147	2	4,159,680	2	13,080,072	66.67	53.21	5	37,661,072	100.00	188.31	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,082,000	0	2	35,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,091,519,012	85	16,060,096,948	85	8,800,601,012	85	9,622,132,792	25	2,504,013,690	50	2,472,931,795	65	1,806,801,446	80	1,358,924,657	65	8,142,671,588	76.47	84.62	65	16,060,096,948	76.47	198.48	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	6,346,020,012	1	12,321,892,074	1	6,346,020,012	1	6,865,092,772	1	1,887,143,253	1	1,911,461,549	1	1,388,961,992	1	1,139,709,440	1	6,327,276,234	100.00	92.17	1	12,321,892,074	100.00	194.17	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	6,346,020,012	49	12,321,892,074	49	6,346,020,012	49	6,865,092,772	48	1,887,143,253	48	1,911,461,549	48	1,388,961,992	48	1,139,709,440	48	6,327,276,234	97.96	92.17	48	12,321,892,074	97.96	194.17	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawalan perangkat daerah	Persen	95	95,000,000	95	126,556,486	95	180,000,000	95	126,500,000	20	1,061,668	45	13,592,502	70	46,617,316	90	1,585,000	70	62,856,486	73.68	49.69	70	126,556,486	73.68	133.22	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakoikan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakoikan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	50,000,000	1	36,531,672	1	60,000,000	1	42,500,000	0	1,061,668	1	13,592,502	0	1,592,502	0	1,585,000	1	17,831,672	100.00	41.96	2	36,531,672	100.00	73.06	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	6	90,024,814	3	120,000,000	3	84,000,000	0	0	0	0	3	45,024,814	0	0	3	45,024,814	50.00	53.60	9	90,024,814	300.00	200.06	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	474,564,000	75	771,339,014	75	569,564,000	75	649,215,000	20	62,268,494	40	133,870,367	60	103,752,173	0	14,089,980	60	313,981,014	80.00	48.36	135	771,339,014	180.00	162.54	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	111,000,000	0	12	116,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	12	85,196,100	12	12,000,000	12	52,500,000	3	4,427,800	3	7,828,200	3	12,207,100	3	3,075,000	9	27,538,100	75.00	52.45	21	85,196,100	175.00	709.97	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	46,400,000	12	295,521,000	12	60,000,000	12	238,720,000	3	27,656,000	3	64,015,000	3	60,850,000	0	0	9	152,521,000	75.00	63.89	21	295,521,000	175.00	636.90	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	12	34,991,900	12	60,000,000	12	40,595,000	3	1,909,100	3	6,695,000	3	5,553,800	3	834,000	9	14,991,900	75.00	36.93	21	34,991,900	175.00	58.32	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8,000,000	0	12	8,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	87,487,536	1	60,000,000	1	75,600,000	1	10,174,366	1	9,055,260	1	12,801,930	1	4,855,980	1	36,887,536	100.00	48.79	2	87,487,536	200.00	145.81	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	169,964,000	40	268,142,478	40	241,564,000	40	241,800,000	15	18,101,228	35	46,276,907	13	12,339,343	12	5,325,000	63	82,042,478	157.50	33.93	103	268,142,478	257.50	157.76	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	17	7,200,000	0	17	12,000,000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	190,000,000	75	1,148,257,375	75	599,082,000	75	945,708,000	25	349,932,375	50	196,444,250	65	7,214,250	70	4,809,500	65	558,400,375	86.67	59.05	140	1,148,257,375	186.67	604.35	

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan				
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12		15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	4A																							16		
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	1	519,220,000	1	40,000,000	1	281,300,000	8	249,220,000	0	0	0	0	0	0	8	249,220,000	800.00	88.60	9	519,220,000	900.00	1,298.05	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	4	0	4	130,000,000	4	69,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	0	100.00	0.00		
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	5	629,037,375	5	367,082,000	5	544,657,000	24	100,712,375	24	196,444,250	24	7,214,250	24	4,809,500	24	309,180,375	480.00	56.77	29	629,037,375	580.00	629.04	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30,000,000	0	0	2	62,000,000	2	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	727,500,000	100	1,423,272,866	100	747,500,000	100	880,551,700	25	183,034,722	50	205,422,990	75	186,880,208	95	192,445,746	50	767,783,666	50.00	87.19	150	1,423,272,866	150.00	195.64	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	12	60,897,250	12	8,000,000	12	31,158,000	3	12,906,000	3	7,214,250	3	7,214,250	3	2,404,750	9	29,739,250	75.00	95.45	21	60,897,250	175.00	761.22	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60,000,000	12	67,124,917	12	60,000,000	12	104,531,300	3	6,491,118	3	9,508,740	3	8,965,958	3	7,759,101	9	32,724,917	75.00	31.31	21	67,124,917	175.00	111.87	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	659,500,000	12	1,295,250,699	12	679,500,000	12	744,862,400	3	163,637,604	3	188,700,000	3	170,700,000	3	182,281,895	9	705,319,499	75.00	94.69	21	1,295,250,699	175.00	196.40	
7.01.01.2.08.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	258,435,000	75	268,779,133	75	358,435,000	75	155,065,320	30	20,573,178	40	12,140,137	60	73,375,507	70	6,284,991	60	112,373,813	80.00	72.47	135	268,779,133	180.00	104.00	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	68,435,000	6	160,734,763	5	68,435,000	5	100,355,320	5	16,373,178	5	12,140,137	5	27,891,137	5	6,284,991	5	62,689,443	100.00	62.47	11	160,734,763	220.00	234.87	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	5	34,910,000	5	30,000,000	5	18,110,000	0	0	0	0	5	13,150,000	0	0	5	13,150,000	100.00	72.61	10	34,910,000	200.00	69.82	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	120,000,000	5	73,134,370	5	140,000,000	5	36,600,000	1	4,200,000	0	0	1	32,334,370	0	0	1	36,534,370	20.00	99.82	6	73,134,370	120.00	60.95	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	363,558,000	20	259,787,069	100	463,558,000	100	76,501,916	25	15,126,422	50	10,163,808	75	4,632,758	95	963,445	75	30,886,433	75.00	40.37	95	259,787,069	95.00	71.46	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	363,558,000	100	259,787,069	55	463,558,000	55	76,501,916	23	15,126,422	20	10,163,808	8	4,632,758	4	963,445	51	30,886,433	92.73	40.37	151	259,787,069	274.55	71.46	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	363,558,000	1	259,787,069	12	463,558,000	12	76,501,916	3	15,126,422	3	10,163,808	3	4,632,758	3	963,445	9	30,886,433	75.00	40.37	10	259,787,069	83.33	71.46	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	41,100,000	100	138,068,880	100	101,100,000	100	124,066,540	10.43	12,934,370	48.69	47,476,175	50	16,241,555	80	7,664,864	50	84,316,964	50.00	67.96	150	138,068,880	150.00	335.93	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	41,100,000	60	138,068,880	100	101,100,000	100	124,066,540	10.43	12,934,370	48.69	47,476,175	50	16,241,555	80	7,664,864	50	84,316,964	50.00	67.96	110	138,068,880	110.00	335.93	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	41,100,000	12	138,068,880	8	101,100,000	8	124,066,540	8	12,934,370	8	47,476,175	8	16,241,555	8	7,664,864	8	84,316,964	100.00	67.96	20	138,068,880	250.00	335.93	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketertaman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	100	132,417,140	25	40,000,000	25	43,919,550	59.43	26,101,720	66.77	3,224,580	70.02	1,424,580	80	649,720	70	31,400,600	280.08	71.50	170.02	132,417,140	680.08	662.09	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	100	132,417,140	80	40,000,000	80	43,919,550	59.43	26,101,720	66.77	3,224,580	70.02	1,424,580	80	649,720	70	31,400,600	87.53	71.50	170.02	132,417,140	212.53	662.09	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	8	132,417,140	12	40,000,000	12	43,919,550	8	26,101,720	8	3,224,580	8	1,424,580	8	649,720	8	31,400,600	66.67	71.50	16	132,417,140	133.33	662.09	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	102,000,000	100	131,462,209	100	90,000,000	100	82,996,140	25	22,801,356	50	26,879,122	75	5,097,522	90	2,438,069	75	57,216,069	75.00	68.94	175	131,462,209	175.00	128.88	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	102,000,000	100	131,462,209	100	90,000,000	100	82,996,140	25	22,801,356	50	26,879,122	75	5,097,522	90	2,438,069	75	57,216,069	75.00	68.94	175	131,462,209	175.00	128.88	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	8	30,000,000	8	69,772,009	8	30,000,000	8	41,156,440	8	22,801,356	8	5,103,622	8	1,647,522	8	1,313,069	8	30,865,569	100.00	75.00	16	69,772,009	200.00	232.57	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi										Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16		
		Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa																												
7.01.06.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	72,000,000	12	61,690,200	12	60,000,000	12	41,839,700	3	0	3	21,775,500	3	3,450,000	3	1,125,000	9	26,350,500	6.00	62.98	21	61,690,200	175.00	85.68			
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																													
7.01.		KECAMATAN																													
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,503,736,598	100	213,389,500	100	864,380,000	25	223,141,311	50	190,999,866	75	212,910,445	95	102,434,976	75	729,486,598	75.00	84.39	175	1,503,736,598	175.00	1,420.10			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,503,736,598	55	213,389,500	55	864,380,000	21	223,141,311	36	190,999,866	45	212,910,445	70	102,434,976	45	729,486,598	81.82	84.39	105	1,503,736,598	190.91	1,420.10			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,503,736,598	12	213,389,500	12	864,380,000	3	223,141,311	3	190,999,866	3	212,910,445	3	102,434,976	9	729,486,598	75.00	84.39	21	1,503,736,598	175.00	1,420.10			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	200,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																													
7.01.		KECAMATAN																													
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,506,300,070	100	213,389,500	100	915,655,000	25	132,289,500	50	162,452,292	75	277,933,950	95	106,599,328	75	679,275,070	75.00	74.18	175	1,506,300,070	175.00	1,422.52			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,506,300,070	55	213,389,500	55	915,655,000	29	132,289,500	52	162,452,292	65	277,933,950	80	106,599,328	65	679,275,070	118.18	74.18	125	1,506,300,070	227.27	1,422.52			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,506,300,070	12	213,389,500	12	915,655,000	3	132,289,500	3	162,452,292	3	277,933,950	3	106,599,328	9	679,275,070	75.00	74.18	21	1,506,300,070	175.00	1,422.52			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	200,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																													
7.01.		KECAMATAN																													
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	931,118,762	100	213,389,500	100	586,458,380	25	94,642,314	50	118,410,414	75	102,407,282	95	91,330,372	75	406,790,382	75.00	69.36	175	931,118,762	175.00	879.33			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	931,118,762	55	213,389,500	55	586,458,380	13	94,642,314	21	118,410,414	25	102,407,282	43	91,330,372	25	406,790,382	45.45	69.36	85	931,118,762	154.55	879.33			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	931,118,762	12	213,389,500	12	586,458,380	3	94,642,314	3	118,410,414	3	102,407,282	3	91,330,372	9	406,790,382	75.00	69.36	21	931,118,762	175.00	879.33			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	200,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																													
7.01.		KECAMATAN																													

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi										Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV																
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100										
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16						
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,169,518,466	100	213,389,500	100	733,130,000	25	132,095,950	50	133,753,276	75	177,714,742	95	74,454,498	75	518,018,466	75.00	70.66	175	1,169,518,466	175.00	1,104.47							
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,169,518,466	55	213,389,500	55	733,130,000	29	132,095,950	60	133,753,276	68	177,714,742	75	74,454,498	68	518,018,466	123.64	70.66	128	1,169,518,466	232.73	1,104.47							
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,169,518,466	12	213,389,500	12	733,130,000	3	132,095,950	3	133,753,276	3	177,714,742	3	74,454,498	9	518,018,466	75.00	70.66	21	1,169,518,466	175.00	1,104.47							
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00								
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	4	200,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00								
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00								

16
17
18

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir RENSTRA (2026)	Target		Realisasi		Capaian	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJiP	Nilai	79,87	80	79,90	79,95	72,34	65,65	90,54	82,11
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	90	80	85	80	85	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	0	100	100	100	85	90	85	90,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pesentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Persen	0	100	100	100	80	95	80	95,00
Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pesentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	100	100	100	80	80	80	80,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100,00

19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur
 - 2) Belum optimalnya Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
 - 3) Belum optimalnya Pembenahan dan Peningkatan Infrastruktur di wilayah Kecamatan Bunguran Timur
 - 4) Masih lemahnya integritas data antara Kecamatan Bunguran Timur dan Perangkat Daerah
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Bunguran Timur memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
 - b. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
 - c. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
 - d. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
 - e. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
 - f. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - g. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - h. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
- 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
- 3) Banyaknya pembenahan infrastruktur di wilayah Kecamatan Bunguran Timur.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Kecamatan Bunguran Timur dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Rancangan Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisi kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada table lampiran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, melalui Musrenbang desa, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang kecamatan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;

- 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
 - 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
 - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,

- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional tahun 2024, antara lain meliputi :

- a. Kemiskinan;
- b. Lapangan Kerja;
- c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Industri.

3.2 Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2025 berfokus pada tiga hal yaitu :

1. Pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan dengan fungsi Kecamatan Bunguran Timur adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang ada dikecamatan serta memberikan layanan public terhadap segala bentuk administrasi yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan.
2. Penguatan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan dengan fungsi Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Melaksanakan kebijakan upaya peningkatan kinerja, serta kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur yaitu pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan SDM melalui peningkatan bina mental Masyarakat, menjalin koordinasi dalam upaya peningkatan kualitas SDM pegawai dan Masyarakat.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga

mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Kecamatan Bunguran Timur merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak

adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah Menciptakan Pemerintah Kecamatan yang Bersih, Berwibawa dengan memberikan Pelayanan Prima sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tahun 2025

MISI 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayanan masyarakat			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Menciptakan Pemerintah Kecamatan yang Bersih, Berwibawa dengan Memberikan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas SKPD	Nilai Evaluasi LAKIP
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa		Meningkatnya Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa	Peringkat Prestasi MTQTingkat Kabupaten
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Organisasi Kemasyarakatan	Persentase PKK dan Karang Taruna Aktif

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2025
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

SKPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Kondisi Awal	Target 1	Target 2	Target 3	Target 4	Target 5	Satuan	Formulasi	Sumber Data
Kecamatan Bunguran Timur	Meningkatnya pengamalan agama	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	1.1.1.1.1. Meningkatkan pembinaan di bidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina		0	70	70	80	80	90	Persen	Jumlah kegiatan keagamaan yang dibina / Jumlah kegiatan keagamaan x 100	-
Kecamatan Bunguran Timur	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	3.1.1.1.1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada		0	70	75	80	85	90	Persen	-	-
Kecamatan Bunguran Timur	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	6.1.1.1.1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP		7987	7990	7995	8000	8000	8000	Nilai	-	-
Kecamatan Bunguran Timur	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	6.1.1.2.1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.48	3.49	3.50	3.51	3.52	3.53	Indeks	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat

3.4 Kebijakan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sesuai dengan arah Pembangunan RKPD tahun 2025, maka pada tahun 2025 arah kebijakan program kegiatan Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu melalui upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang berbasis digital, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran dll. Diantara bentuk strategi nya adalah Fasilitasi peningkatan pelayanan publik bagi entitas yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat. Serta Peningkatan layanan administrasi kepegawaian.
2. Peningkatan Ekonomi DaPerah, yaitu melalui optimalisasi kebijakan perekonomian dan Pembangunan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Mendorong penyerapan anggaran APBD seoptimal mungkin dalam bentuk percepatan belanja daerah fisik maupun non fisik. Melakukan koordinasi terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia, ada dua yang menjadi sasaran yaitu SDM Pemudaan sebagai asset daerah dan SDM Kepegawaian. SDM Kepemudaan melalui peningkatan pendidikan iman dan taqwa. strateginya yang akan ditempuh untuk peningkatan kualitas SDM yaitu penguatan IMTAQ kalangan remaja melalui kegiatan Bina Mental Spritual. Sementara SDM kepegawaian melalui peningkatan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan diklat fungsional, bimbingan teknis sesuai kebutuhan yang strategis.

Berikut adalah target kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Indikator Sasaran Program Kecamatan Bunguran Timur

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2025
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,52
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	80
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap perda dan perkada	100 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 serta Resntra Kecamatan Bunguran Timur 2022-2026.
2. Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Kecamatan Bunguran Timur bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan.
3. Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan.
5. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Kecamatan Bunguran Timur
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 6 program dan 12 kegiatan dan 30 Sub kegiatan
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.298.259.012,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rekapitulasi program kegiatan dan pendanaan tahun 2025 disajikan dalam tabel pada lampiran.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KAB. NATUNA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR						9.298.259.012,00							9.248.259.012,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						122.999.400,00							123.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						122.999.400,00							123.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	-			20 PERSEN	122.999.400,00						-	123.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 PERSEN	122.999.400,00			-	-	-	-	123.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	122.999.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		123.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						9.175.259.612,00							9.125.259.012,00	
	7.01	KECAMATAN						9.175.259.612,00							9.125.259.012,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.442.173.312,00						-	8.391.701.012,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	70.082.000,00			-	-	-	-	70.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50.082.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelengkapan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 TEPAT WAKTU	6.346.033.012,00			-	-	-	-	6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	6.346.033.012,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penelausahan Arsip Dinamis pada SKPD				17 Dokumen	12.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 PERSEN	250.884.200,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	44.996.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	84.999.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	80.888.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 PERSEN	747.500.000,00			-	-	-	-	747.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	679.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		679.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 PERSEN	288.019.000,00			-	-	-	-	288.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	68.203.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	149.816.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 PERSEN	523.097.800,00						-	523.558.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	523.097.800,00			-	-	-	-	523.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	59.999.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	463.098.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		463.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS	-			100 PERSEN	79.996.100,00						-	80.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	-			100 PERSEN	79.996.100,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat														
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Komunitas	79.996.100,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 PERSEN	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	-			90 PERSEN	40.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 PERSEN	89.992.400,00						-	90.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 PERSEN	89.992.400,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	59.992.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	J U M L A H							9.298.259.012,00							9.248.259.012,00	

Kab. Natuna, 07 Agustus 2024

Plt. Camat Bunguran Timur
Kabupaten Natuna

HARMIDI, S.A.P.
NIP. 19740101 199803 1 008

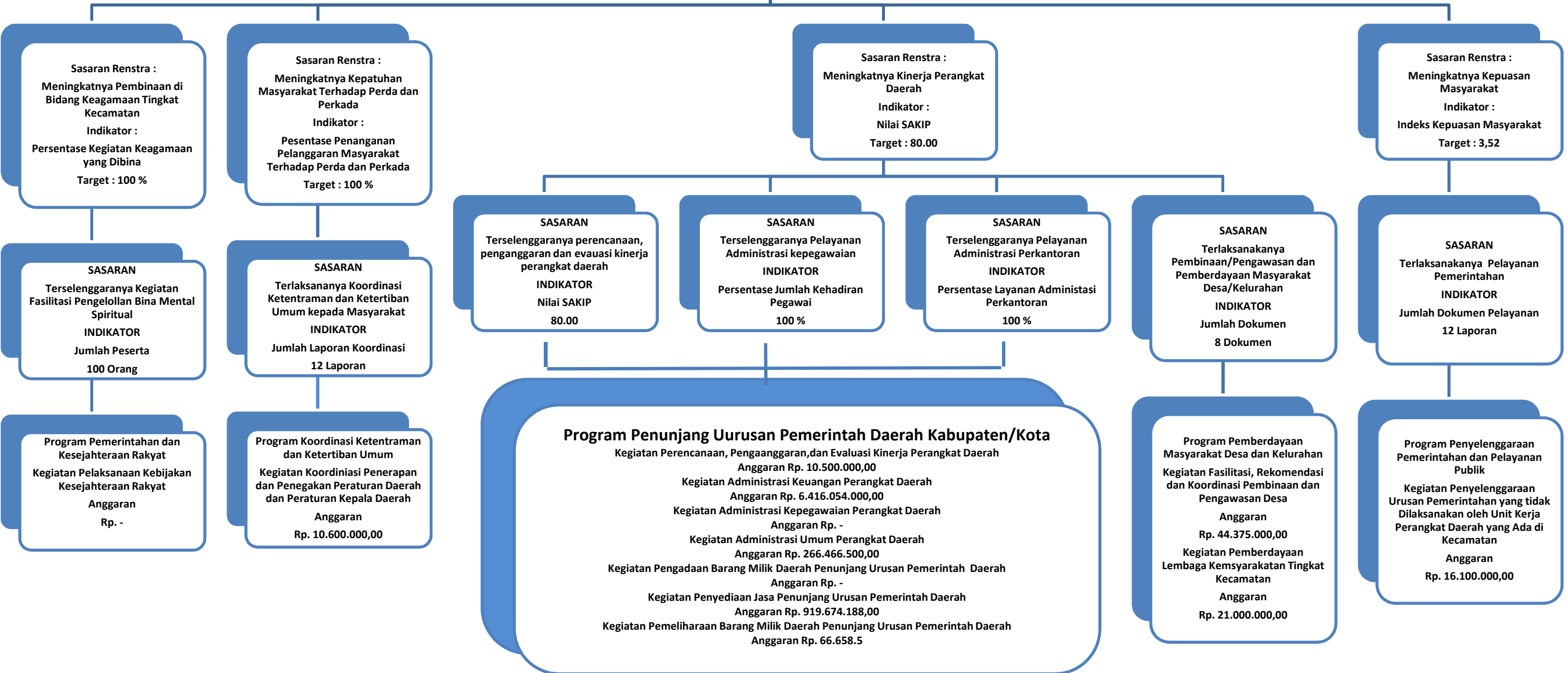


4.2 Cascading dan Crosscutting

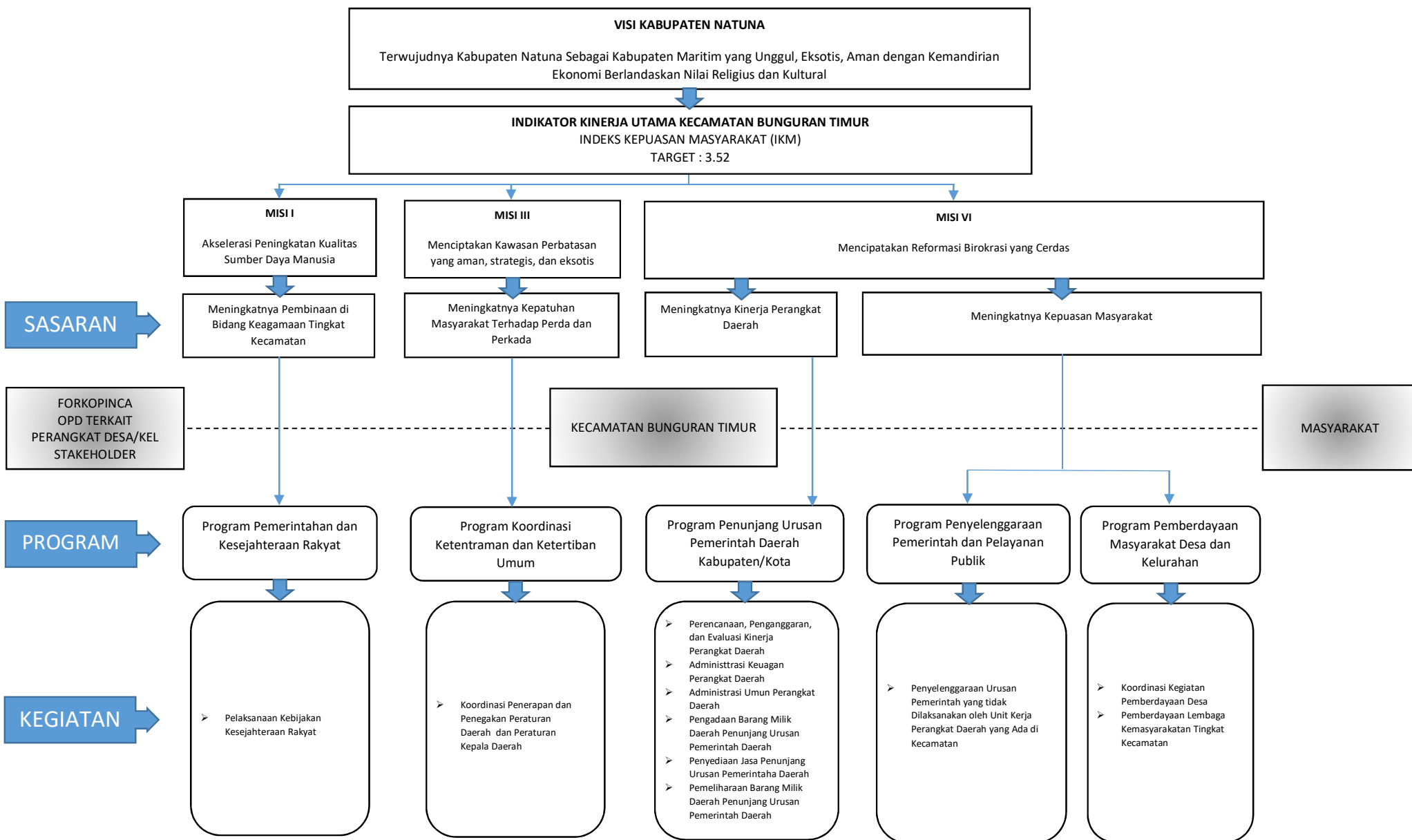
Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauhmana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Cascading Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Cascading Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025**. sedangkan Crosscutting Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada **Cross Cutting Kinerja Program Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025**.

CASCADING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TAHUN 2025

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR



CROSSCUTTING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR 2025



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Kecamatan Bunguran Timur agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Bunguran Timur melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan perangkat daerah yang lain.

Semoga dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024 mendorong peningkatan kualitas kinerja dalam perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Selain itu diharapkan Rencana Kerja tahun 2025 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, Agustus 2024

**Pt. CAMAT BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA**



HARMIDI, S.A.P

NIP. 19740101 1 99803 1 008

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KAB. NATUNA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR						9.298.259.012,00							9.248.259.012,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						122.999.400,00							123.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						122.999.400,00							123.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	-			20 PERSEN	122.999.400,00						-	123.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 PERSEN	122.999.400,00			-	-	-	-	123.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	122.999.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		123.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						9.175.259.612,00							9.125.259.012,00	
	7.01	KECAMATAN						9.175.259.612,00							9.125.259.012,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.442.173.312,00						-	8.391.701.012,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	70.082.000,00			-	-	-	-	70.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50.082.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelengkapan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 TEPAT WAKTU	6.346.033.012,00			-	-	-	-	6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	6.346.033.012,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penelausahan Arsip Dinamis pada SKPD				17 Dokumen	12.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 PERSEN	250.884.200,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	44.996.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	84.999.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	80.888.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 PERSEN	747.500.000,00			-	-	-	-	747.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	679.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		679.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 PERSEN	288.019.000,00			-	-	-	-	288.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	68.203.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	149.816.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 PERSEN	523.097.800,00						-	523.558.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	523.097.800,00			-	-	-	-	523.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	59.999.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	463.098.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		463.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	59.992.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	J U M L A H							9.298.259.012,00							9.248.259.012,00	

Kab. Natuna, 07 Agustus 2024

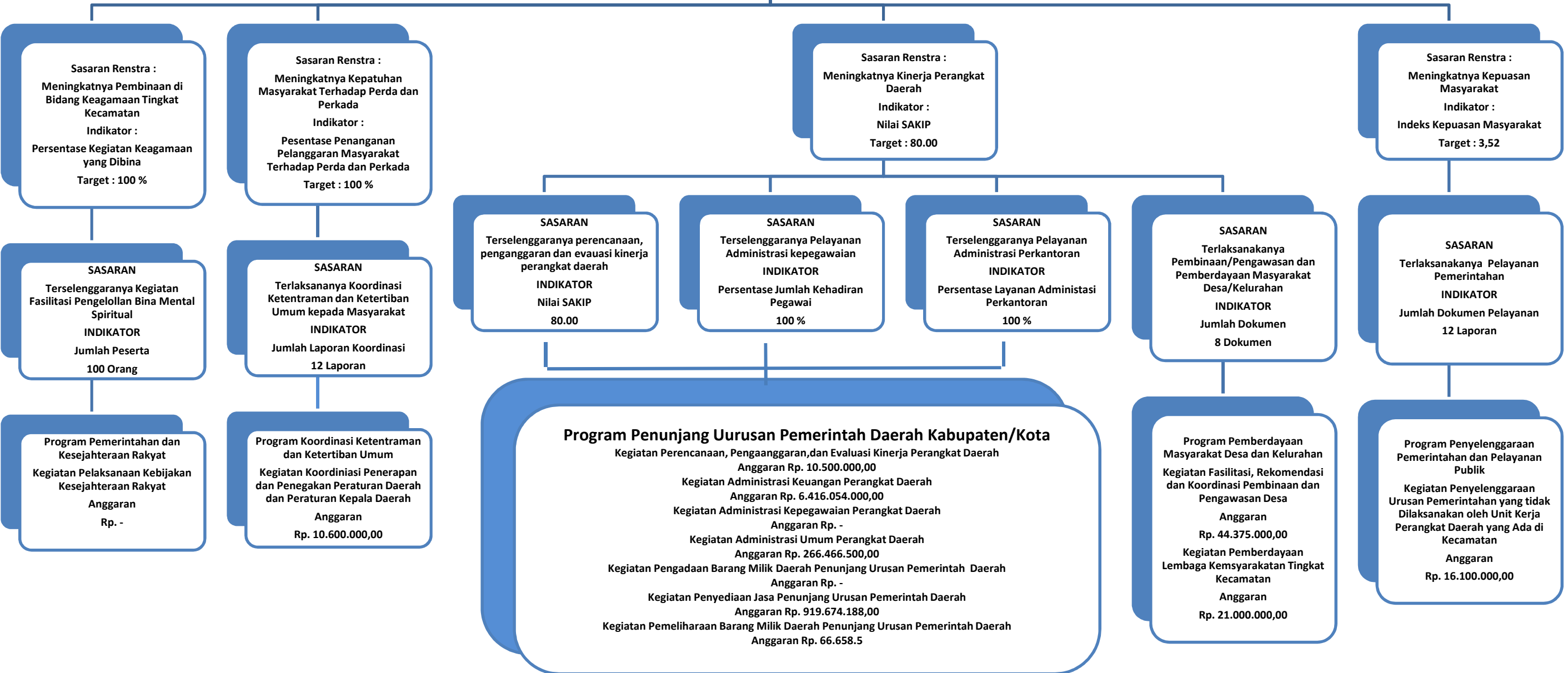
Plt. Camat Bunguran Timur
Kabupaten Natuna

HARMIDI, S.A.P.
NIP. 19740101 199803 1 008



CASCADING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TAHUN 2025

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR



CROSSCUTTING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR 2025

